

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berfokus pada sektor-sektor yang menjadi keunggulan suatu daerah dipandang menjadi salah satu langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah saat ini (Randi,2021). Pembangunan daerah melalui otonomi daerah memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada di wilayahnya secara lebih mandiri. Dalam konteks ini, daerah memiliki tugas penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan yang mencakup berbagai aspek, salah satunya yaitu pada bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah sendiri dapat dinilai dari berbagai macam indikator, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dan besarnya nilai tambah yang dihasilkan berbagai sektor seperti pertanian, industri dan jasa. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Pertumbuhan ini biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkan

sumber daya yang dimilikinya. Setiap daerah pada dasarnya memiliki yang berbeda-beda, baik dari sisi sumber daya alam, tenaga kerja, posisi



geografis hingga aspek sosial budaya yang khas. Potensi ini menjadi modal dasar bagi daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing daerahnya. Namun tidak hanya itu, diperlukan langkah untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang memiliki keterkaitan paling erat atau sesuai dengan potensi tersebut dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Identifikasi sektor unggulan di anggap menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikaitkan pada kondisi bahwa pertumbuhan tidak terjadi secara merata di semua sektor. Setiap sektor memiliki karakteristik, potensi dan tantangan yang berbeda. Ada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah. Disisi lain, ada pula sektor yang stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh peran sektor-sektor yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian. Sektor ini yang kemudian dikenal sebagai sektor unggulan. Sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah (Wibisono dkk,2019).

Setiap daerah di Indonesia baik provinsi dan kabupaten memiliki sektor dengan potensi ekonominya masing-masing. Sektor-sektor yang mendasari pertumbuhan suatu wilayah memiliki potensi unggulan. Dengan dukungan kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki, sektor unggulan memiliki peran strategis dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Sektor ini merupakan sektor-

ing mampu memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap sektor-innya dan perekonomian secara keseluruhan. Sektor unggulan dapat



menciptakan berbagai kegiatan yang kemudian akan menyebar dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Hasyadi,2023). Namun, terdapat kendala dimana masih terdapat daerah di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat kurangnya pengelolaan terhadap sektor-sektor unggulan (Gumilar,2020). Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 2,52%, kemudian di tahun berikutnya tumbuh di angka 3,05%, dan mencapai pertumbuhan di angka 3,52% di tahun 2023. Meskipun secara tren menunjukkan peningkatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi NTT masih berada di kisaran 3% per tahun, relatif tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lainnya maupun nasional yang rata-rata tumbuh di angka 4-5%.

Salah satu faktor penyebab kondisi ini dapat dikaitkan dengan belum optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Provinsi NTT memiliki berbagai potensi sumber daya, baik di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan hingga pariwisata yang memberikan ruang untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kurangnya integrasi antara potensi yang ada dengan strategi pembangunan ekonomi daerah menyebabkan potensi ini tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah berupa identifikasi sektor unggulan sebagai dasar untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi tersebut sehingga dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Tabel 1. 1 Provinsi dengan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Terendah di Indonesia Tahun 2023

	Provinsi	PDRB per Kapita (juta rupiah)
1	Papua Pegunungan	9,095
2	Nusa Tenggara Timur	13,513
3	Maluku	18,393
4	Nusa Tenggara Barat	18,687
5	Sulawesi Barat	23,919
6	Bengkulu	24,948
7	Gorontalo	26,086
8	Aceh	26,800
9	Kalimantan Barat	27,560
10	Lampung	28,907

Sumber :BPS Indonesia (diolah)

Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong dalam provinsi dengan pendapatan per Kapita rendah. Berdasarkan **Tabel 1.2.** pada tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan PDRB per kapita terendah yaitu sebesar 13,513 juta rupiah. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi di suatu wilayah. Rendahnya pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kinerja sektor - sektor perekonomian yang menjadi penyumbang dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT belum berjalan secara optimal, sehingga kondisi ini juga mengindikasikan belum maksimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan identifikasi terhadap sektor-sektor basis maupun untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah.



Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur (miliar rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
A.Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	18.496,01	18.680,64	19.601,90	20.341,73	20.841,79	19.592,41
B.Pertambangan dan Penggalian	938,71	813,61	829,03	846,48	877,39	861,04
C.Industri Pengolahan	917,00	867,30	823,08	877,99	942,34	885,54
D.Pengadaan Listrik dan Gas	52,16	58,57	61,43	65,22	73,14	62,10
E.Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang	45,25	47,99	53,43	54,50	55,84	51,40
F.Konstruksi	7.575,98	6.832,32	7.311,42	7.262,24	7.854,71	7.367,33
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.382,04	7.880,41	8.216,89	8.798,30	9.282,59	8.512,05
H.Transportasi dan Pergudangan	3.646,08	3.202,64	3.281,84	3.437,54	3.563,34	3.426,29
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	524,49	381,71	399,79	473,47	524,19	460,73
J.Informasi dan Komunikasi	6.118,15	6.849,74	7.040,61	7.354,43	7.582,17	6.989,02
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	2.672,52	2.901,46	2.975,72	3.013,24	3.069,46	2.926,48
L.Real Estat	1.657,83	1.632,32	1.680,83	1.731,34	1.771,21	1.694,71
M,N.Jasa Perusahaan	181,72	110,35	94,16	97,43	100,74	116,88
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,dan Jaminan Sosial Wajib	9.175,64	9.598,86	9.267,60	9.444,93	9.539,65	9.405,34
P.Jasa Pendidikan	5.913,24	6.024,75	5.889,97	5.859,34	6.015,49	5.940,56
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.564,17	1.632,67	1.779,86	1.797,71	1.870,77	1.729,04
R,S,T,U.Jasa Lainnya	1.528,02	1.294,28	1.232,99	1.239,38	1.292,74	1.317,48
Produk Domestik Regional Bruto	69.389,00	68.809,60	70.540,56	72.695,28	75.257,56	71.338,40

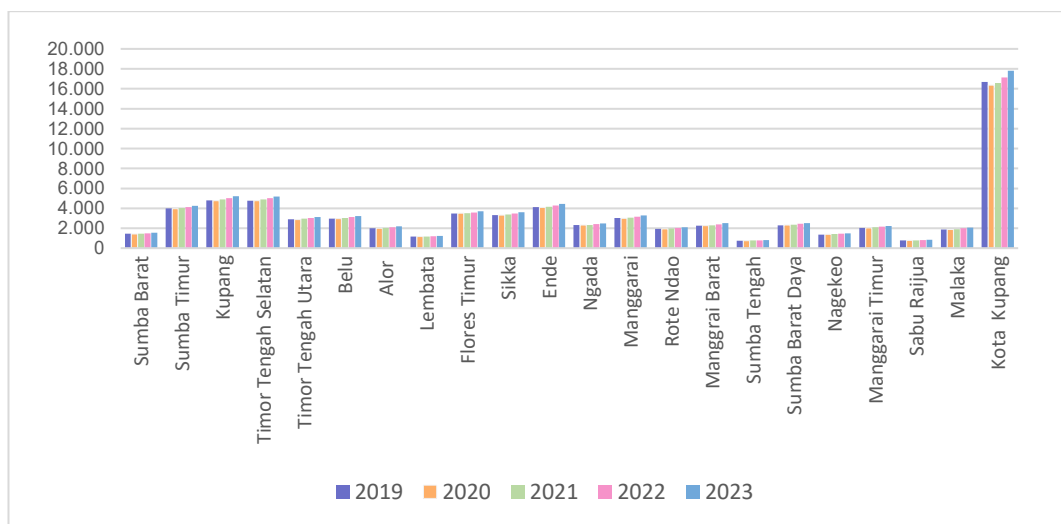
Sumber :BPS Nusa Tenggara Timur (diolah)

Dari table 1.1 dapat diketahui struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh lima sektor utama yang meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 19.592,41 miliar rupiah (27,46%), sektor Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9.405,34 miliar rupiah (13,18%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 8.512,02 miliar rupiah (11,93%), sektor Konstruksi sebesar 7.367,33 miliar rupiah (10,33%) dan sektor Informasi dan Komunikasi 6.989,02 miliar rupiah (9,80%). Sementara untuk sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi



ih rendah. Kontribusi dari setiap sektor dalam pembentukan Produk : Regional Bruto (PDRB) menunjukkan peranan masing-masing sektor

terhadap perekonomian secara keseluruhan. Namun, adanya perbedaan kontribusi antar sektor mencerminkan bahwa tidak semua sektor memiliki kapasitas yang sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan Hirschman, menurutnya dalam proses pembangunan akan tampak berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami laju perkembangan yang berbeda, dan dalam perkembangan tersebut terdapat *leading sectors* yang akan merangsang perkembangan sektor lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Utami, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi potensi sektor basis maupun unggulan di antara sektor-sektor tersebut.



Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur (diolah)

**Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Timur (miliar rupiah),2019-2023**

Selanjutnya, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat kabupaten/kota memperlihatkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, Kota Kupang menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai mencapai 17.810,93 miliar rupiah pada tahun 2023,

diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 5.197,44 miliar rupiah, dan berada di kabupaten Sumba Tengah sebesar 809,49 miliar rupiah.



Adanya perbedaan kontribusi yang cukup signifikan antar daerah dalam pembentukan PDRB provinsi Nusa Tenggara Timur mencerminkan bahwa setiap daerah memiliki konsentrasi sektor ekonomi yang berbeda satu sama lain. Demikian pula dengan masih rendahnya kontribusi di beberapa daerah juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sektor-sektor ekonomi dengan potensi unggulan yang belum tergali atau diketahui prospek pengembangannya sehingga dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antar daerah adalah dengan penentuan sektor-sektor unggulan. Melalui kebijakan ini diharapkan setiap daerah dapat mengembangkan sektor-sektor ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dengan perkembangan perekonomian yang baik di setiap daerah maka hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mendorong perekonomian wilayah di atasnya. Sama halnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya yang beragam, identifikasi sektor-sektor basis maupun unggulan di masing-masing kabupaten/kota menjadi penting dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah.

Mengacu pada uraian diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis, prospektif dan unggulan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor unggulan setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerahnya, kemudian pemerintah dalam hal ini juga dapat memutuskan serangkaian kebijakan yang sesuai untuk pengembangan sektor-sektor ini. Dengan demikian penulis mengambil judul “Analisis Sektor Basis, Prospektif dan

di Provinsi Nusa Tenggara Timur”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Sektor apa saja yang menjadi sektor prospektif pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor prospektif pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai sektor-sektor basis maupun unggulan di setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau informasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan

mengarahkan investasi terutama terkait pengembangan sektor basis dan unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk mencapai kesejahteraan (Frisdiantara,2016).

Dalam definisi lain pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara yang semakin baik atau mapan (Vency,2021). Pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengolah berbagai sumber daya yang ada.dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Chenery dan Syrquin menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antara berbagai proses perubahan di dalam suatu negara. Proses tersebut ditandai oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terlihat dari perubahan kontribusi sektoral di dalam pendapatan nasional yang menunjukkan bagaimana perekonomian erubah dari sektor satu ke sektor lainnya. Teori Chenery,dikenal dengan *ern of development*, dimana dalam teori ini memfokuskan pada tahapan in dalam struktur perekonomian yang terjadi dalam proses pembangunan



negara-negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Vency, 2021).

Menurut Michael Todaro (2015), pembangunan ekonomi adalah proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini mencakup perubahan dalam struktur ekonomi, sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan. Berbagai teori pembangunan telah dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Thomas Robert Malthus dalam (Jhingan, 2012) berpendapat bahwa proses pembangunan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurutnya, proses pembangunan merupakan suatu proses dari naik turunnya aktivitas perekonomian. Jika faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi (tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi) dipakai dalam proporsi yang benar maka hal ini dapat memaksimalkan produksi di dua sektor utama yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Lebih lanjut, Malthus menjelaskan bahwa dari keempat faktor tersebut, proses akumulasi modal merupakan faktor terpenting bagi pembangunan ekonomi.

Kondisi antar daerah yang berbeda memberikan dampak yang berbeda pula pada berbagai penerapan pembangunan. Pola kebijakan yang dimiliki suatu daerah belum tentu berhasil dan memberikan dampak yang sama apabila diterapkan pada daerah lainnya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi, potensi, dan sumber daya yang tidak sama. Oleh karena itu, pola kebijakan yang akan diterapkan juga perlu disesuaikan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi



tumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu wilayah. Peningkatan atau penurunan Produk Domestik

Regional Bruto sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dan penurunan di bidang pembangunan dan kegiatan ekonomi (Saudi,2021). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dapat dikatakan perekonomiannya mengalami pertumbuhan ketika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya (Muta'ali,2015).

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah permasalahan perekonomian suatu wilayah dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adapun menurut Kuznet dalam Jhingan (2012), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya.

Beberapa ahli seperti Schumpeter dan Ursuzla Hicks telah membuat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan permbangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan secara spontan dan teputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi yang ada sebelumnya. Sementara itu pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dengan ditunjang oleh faktor-faktor nonekonomi lainnya.



Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan ah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi an laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi yang

secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin pesat (Chalid,2015). Sementara itu,teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Solow-Swan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berunsur pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi yang saling berinteraksi mempengaruhi besarnya output barang dan jasa suatu negara (Mankiw,2006).

Teori pertumbuhan wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor tersebut untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut.

Dalam Teori Pertumbuhan Tidak Seimbang (*Unbalanced Growth*) yang dikembangkan oleh Albert Hirschman (1958) dikemukakan bahwa tidak ada negara berkembang yang memiliki modal dan sumber daya pembangunan lain dalam jumlah besar untuk melakukan investasi pada semua sektor ,oleh karena itu investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri terpilih agar



cepat berkembang dan dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor yang demikian, perekonomian secara berangsur akan tumbuh dan bergerak dari pertumbuhan tidak seimbang ke arah pertumbuhan seimbang.

Pendukung strategi pertumbuhan tidak seimbang lebih menyukai investasi pada sektor terpilih dari pada investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang investasi baru. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja (Adisasmita, 2013). Hirschman mengusulkan strategi pertumbuhan tidak berimbang di mana negara-negara mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas ke dalam beberapa sektor strategis yaitu, sektor-sektor dengan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang kuat. Keterkaitan ke belakang adalah kemampuan suatu sektor untuk menghasilkan permintaan input dari sektor ekonomi lainnya, sementara keterkaitan ke depan adalah kemampuannya untuk menghasilkan supply/pasokan input bagi sektor ekonomi lainnya, dengan keduanya ditentukan oleh struktur input-output yang ada dalam perekonomian. Dengan demikian, sektor-sektor dengan keterkaitan yang lebih kuat dengan sektor ekonomi lainnya harus memiliki semacam prioritas pembangunan karena pertumbuhannya akan secara efektif mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya (Jiang, dkk, 2020)

Selanjutnya, teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*). Teori ini diperkenalkan oleh ekonom Prancis, Francois Perroux. Dalam teori dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada titik-titik tertentu yang bertindak sebagai “kutub pertumbuhan” (*growth pole*). Kutub pertumbuhan ini adalah pusat-pusat aktivitas ekonomi yang memiliki pengaruh dominan terhadap wilayah sekitarnya. Perroux mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi di suatu daerah dan yang kemudian mendorong perkembangan kegiatan ke seluruh daerah pengaruhnya. Dengan kata lain, kutub pertumbuhan komotif yang menarik daerah-daerah sekitarnya untuk ikut berkembang. Kemudian di kutub pertumbuhan ini kemudian menyebar ke wilayah lain



melalui berbagai mekanisme, seperti peningkatan permintaan akan input produksi, transfer teknologi dan migrasi tenaga kerja (Ardi dkk,2024)

Menurut Sirojuzilam dalam Amalia (2012) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan atau pun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah.

2.1.3 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1955 dan lebih lanjut dikembangkan oleh Tiebout (1956). Teori ini membagi sektor produksi atau jenis kegiatan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas kegiatan basis dan non-basis (Monica *et al*,2017). Dalam teori ini dikemukakan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar wilayah tersebut atau dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah ditentukan pada besarnya kemampuan wilayah dalam mengekspor barang atau jasa. Kegiatan yang melakukan ekspor tersebut disebut sebagai sektor basis (Rizani,2019). Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif sebagai basis ekspor, maka pertumbuhan daerah tersebut dapat ditingkatkan.



Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas dua sektor yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor yang melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa ke luar batas wilayah perekonomian yang

bersangkutan. Sektor basis merupakan sektor yang mampu memenuhi baik kebutuhan dalam wilayah maupun permintaan dari luar wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor barang atau jasa yang dihasilkan ke wilayah lain. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor yang hanya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak mengekspor, sehingga luas lingkup produksi dan daerah pasarnya hanya bersifat lokal (Hutapea,2020)

Dasar pemikiran teori ini adalah karena industri basis mampu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar domestik (daerah sendiri) maupun untuk pasar diluar daerah yang bersangkutan,maka penjualan hasil keluar daerah itu mendatangkan arus pendapatan kedalam daerah tersebut. Dengan demikian, bertambahnya sektor basis di suatu daerah akan menambah permintaan barang dan jasa dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya,berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang masuk kedaerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap kegiatan non basis (Ananda,2018)

Aktivitas basis memiliki peran sebagai penggerak utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional. Inti dari basis ekonomi yaitu arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi pada ekspor

dan jasa keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan ,
an kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang



ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian daerah bersangkutan (Adisasmita, 2018.)

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location Quotient (LQ) yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Emilia & Imelia, 2006). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Hal ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000).

2.1.4 Sektor Unggulan

Potensi perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui identifikasi keunggulan sektor wilayah tersebut. Sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor unggulan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah (Safwadi, 2018). Sektor unggulan terbentuk dari pengembangan produksi yang dihasilkan oleh potensi yang dimiliki daerah. Sektor ini tidak hanya mampu untuk memenuhi permintaan dari dalam daerahnya saja namun juga mampu memenuhi permintaan dari luar daerahnya. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Aprilia, 2015).



Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau kemajuan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya

maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo,2006). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibanding sektor sejenis dari daerah lain. Sektor unggulan juga merupakan sektor yang memberikan nilai tambah dan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik dalam pasar lokal maupun ekspor (Ali,2018). Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian,sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik suatu perekonomian (Prasetya, 2018).

Keberadaan sektor unggulan berperan besar pada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan- keunggulan/ kriteria. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan pada seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah, di antaranya: Pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) maupun ke belakang (backward linkage) yang kuat dengan sektor-sektor lainnya,

empat, sektor unggulan tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan (Widadi, 2018)



Menurut Rachbini (2001), terdapat empat syarat suatu sektor menjadi sektor unggulan/prioritas, yakni : 1) Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan ekonomi berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut. 2) Karena adanya perubahan teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi yang baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas. 3) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. 4) Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, sektor unggulan dapat menjadi dasar pertimbangan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Sektor unggulan memberikan keunggulan komparatif dan kompetitif yang selanjutnya dapat mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa pada suatu wilayah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Sektor unggulan merupakan sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan faktor anugerah (*endowment factors*). Selanjutnya faktor ini berkembang melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Sektor ini memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja terserap dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Suparta I Wayan .dkk (2022) dengan penelitian “Analisis Sektor Unggulan Daerah dalam Struktur Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan”. Metode analisis



unakan dalam penelitian ini yaitu Location Quotient (LQ), Dynamic Quotient (DLQ) dan Shift-share. Hasil gabungan LQ dan DLQ

akan terdapat 5 sektor yang tergolong kedalam sektor unggulan ($LQ > 1$)

dan $DLQ > 1$) dan 12 sektor lainnya masuk dalam sektor Andalan ($LQ < 1$ dan $DLQ > 1$), sedangkan untuk daya saing sektor ekonomi dengan menggunakan Shift-share ($Differential\ shift > 0$) diketahui bahwa hanya sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang bernilai negatif dan sektor lainnya bernilai positif. Berdasarkan analisis tersebut industri unggulan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif di Sumatera Selatan meliputi 5 sektor yang diantaranya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Penyediaan air, pengolahan limbah dan daur ulang; Konstruksi dan sektor Real Estate.

Sutanti dkk (2022) dengan penelitian “Analisis Sektor Unggulan Provinsi Banten Dengan Metode Location Quotient dan Shift Share”. Berdasarkan analisis Location Quotient menunjukkan terdapat sembilan sektor yang menjadi sektor basis dengan $LQ > 1$, sedangkan berdasarkan analisis Shift-share terdapat sembilan sektor yang masing-masing memiliki National share dan Proportional shift yang positif serta sepuluh sektor dengan differential yang positif. Penentuan sektor unggulan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria $LQ > 1$ dan memiliki nilai proportional dan Differential shift yang positif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua sektor unggulan di Provinsi Banten yaitu Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dan Sektor konstruksi. Sedangkan lima belas sektor lainnya masuk dalam kategori sektor non unggulan.

Saraswati (2021) dengan penelitian “Daya Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten Bantul” menggunakan metode Location Quotient dan Shift Share. Hasil analisis terhadap 17 sektor di Kabupaten Bantul menunjukkan terdapat tiga sektor unggulan, empat sektor berkembang, enam sektor berkembang dan empat sektor terbelakang. Sektor yang terbelakang adalah sektor unggulan adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil



dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; pengadaan listrik dan gas. Empat sektor potensial adalah sektor pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi. Terakhir adalah sektor terbelakang yang meliputi sektor pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; jasa perusahaan; serta administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kriteria sektor di Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan nilai rata-rata LQ dan Pergeseran Bersih pada analisis Shift-share.

Pratiwi N .dkk (2024) dengan penelitian “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Unggulan Kota Makassar sebagai Kota Metropolitan di Kawasan Timur Indonesia”. Penelitian ini mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, yang memiliki pertumbuhan cepat dan berdaya saing dengan metode analisis yaitu Location Quotient (LQ), Shift Share dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat sektor unggulan di Kota Makassar yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran :Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa Pendidikan. Sektor-sektor ini memenuhi kriteria sektor unggulan yaitu (basis, pertumbuhan cepat dan kompetitif serta tergolong dalam sektor maju dan tumbuh pesat).

Setiawan H .dkk (2022) dengan penelitian “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Tipologi Klassen. Berdasarkan overlay dari ketiga metode analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua sektor unggulan di DIY yaitu sektor Jasa dan sektor Informasi dan Komunikasi, delapan sektor dengan potensi tinggi (sektor Pengadaan Air, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan



Akomodasi Makan dan Minum, Konstruksi, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Lainnya), sedangkan ketujuh sektor lainnya merupakan sektor non-unggulan maupun sektor non-potensial (sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Jasa Keuangan serta Jasa Perusahaan).

2.3 Kerangka Pikir penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan atau aktifitas ekonomi yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dengan batas perhitungan PDRB adalah daerah/wilayah, sehingga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi yang pemerintah terapkan mampu mendorong aktifitas perekonomian domestik.

Setiap daerah mempunyai potensi ekonominya masing-masing yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Perkembangan aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui peranan masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto yang juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam perkembangan aktivitas masing-masing sektor dapat dilihat bahwa pertumbuhan tidak terjadi secara merata di semua sektor. Beberapa sektor dapat tumbuh lebih



dan memberikan kontribusi besar sehingga dapat menggerakkan
 omian. Disisi lain, terdapat sektor yang mengalami stagnasi dan tumbuh
 ibat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dikaitkan

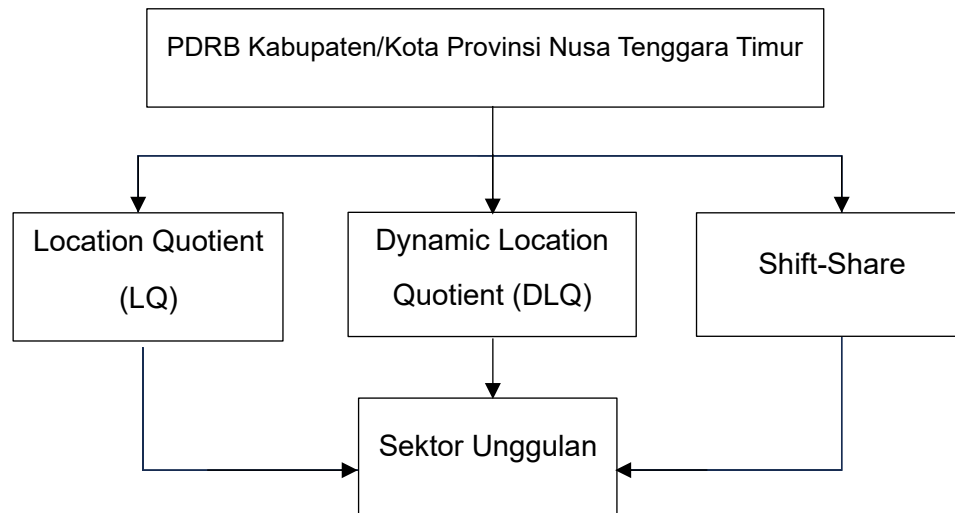
pada kondisi belum optimalnya pemanfaatan sektor-sektor potensial yang ada di wilayah tersebut yang dalam hal ini merupakan sektor basis dan unggulan.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis Location Quotient, Dynamic Location Quotient dan Shift-share untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis, prospektif dan unggulan yang ada pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Location Quotient merupakan teknik analisis untuk mengetahui potensi suatu daerah yang menjadi sektor basis dan non basis. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis sedangkan jika $LQ < 1$ maka dikategorikan sebagai sektor non basis. Selanjutnya, Dynamic Location Quotient digunakan untuk melihat potensi perkembangan suatu sektor apakah prospektif atau tidak dalam menjadi sektor basis kedepannya. $DLQ \geq 1$ menunjukkan sektor tersebut potensial untuk dikembangkan atau bersifat prospektif, sedangkan jika nilai $DLQ < 1$ sektor tersebut tidak prospektif. Sementara itu, metode Shift share digunakan untuk menunjukkan sektor yang memiliki daya saing di suatu wilayah. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kinerja sektor-sektor suatu wilayah yang pengukurannya dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah yang lebih luas dengan membagi pertumbuhan sektor menjadi tiga komponen pengaruh-pengaruh : pertumbuhan nasional (National share), Bauran industri (Industry mix/Proportional shift) dan Keunggulan kompetitif/Daya saing (Differential shift). Komponen Proportional shift mengukur apakah daerah berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat provinsi pertumbuhannya cepat. Komponen Differential shift mengukur bagaimana tingkat daya saing pada setiap sektor. Jika komponen Differential shift bernilai positif (+), maka sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan



yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Dengan menggunakan ketiga pendekatan analisis tersebut, sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis, prospektif, pertumbuhannya cepat dan memiliki daya saing

digunakan sebagai indikator untuk menentukan sektor unggulan yang ada pada tingkat kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara timur. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini yang digambarkan melalui bagan di bawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

